

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial di Indonesia sejak dahulu hingga detik ini. Melihat jumlah dan kecenderungannya, kemiskinan di negeri ini tampaknya bukan lagi merupakan kejadian yang sifatnya sementara (*transient event*), melainkan sudah menjadi fenomena masal yang kronis dan mendalam, bahkan dalam banyak kasus, kemiskinan sudah bersifat antar-generasi.

Masalah kemiskinan tentu harus segera dicarikan solusinya, kalau dibiarkan hal tersebut akan menimbulkan dampak yang cenderung negatif dalam berbagai aspek. Menurut Suharto(2009:14), semua negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban umat manusia dan untuk itu semua umat manusia setuju bahwa kemiskinan harus dan bisa ditanggulangi.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang sudah mewabah ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Pemerintah melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin diberbagai daerah yang tersebar diseluruh Indonesia. Program-programtersebut bermacam-macam sepertiprogram bantuan untuk rumah tangga miskin yang sifatnya jaringan pengaman sosial Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), Kartu Sehat sampai kepada program yang bersifat penambahan modal usaha untuk rumah tangga miskin seperti P2KP. Selain itu ada

juga program yang berbentuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan yang berguna untuk memperlancar aksesibilitas daerah-daerah yang masih sulit untuk dijangkau atau daerah-daerah terpencil. Program-program yang telah dijalankan itu membuktikan bahwa sebenarnya pemerintah juga telah berusaha untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin di Negara ini.

Namun hasil yang didapat belumlah maksimal, seperti hasil penelitian yang didapat oleh Afrizal et.al (2006:75) saat melakukan penelitian tentang pemetaan kemiskinan dan strategi pengentasannya yang berbasis institusi lokal dan berkelanjutan dalam era otonomi daerah di Provinsi Sumatera Barat, bahwa program yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan kemajuan secara signifikan dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian rumah tangga miskin dan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah hanya bersifat karitatif, sehingga tidak memunculkan dorongan kepada orang miskin untuk berupaya mengatasi kemiskinannya. Secara umum program-program pengentasan kemiskinan belum membuat perekonomian orang miskin membaik.

Selain itu LP3ES, juga menemukan berbagai penyimpangan-penyimpangan dana kompensasi pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah pasca reformasi bergulir. Beberapa penyimpangan yang terjadi antara lain: bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, sekitar 22% penerima beras untuk rumah tangga miskin yang ditetapkan oleh BPS, hanya sekitar 18% rumah tangga berkategori miskin yang menerima subsidi Raskin sekaligus memanfaatkan pelayanan kesehatan. Selain itu bantuan yang diberikan tidak tepat waktu. Dana kompensasi BBM yang diterima oleh keluarga miskin diberikan jauh-jauh hari setelah

pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM dan proses penyalurannya rumit dan birokratis. Banyak masyarakat kecil yang tidak ambil peduli terhadap dana kompensasi BBM, karena mempertimbangkan berbagai kerumitan dan mekanisme birokratis pelaksanaan programnya. Sebab instansi terkait memberikan syarat yang bermacam-macam dan harus dipenuhi terlebih dahulu<sup>1</sup>.

Untuk menyikapi kegagalan program akibat kekurangan-kekurangan yang terjadiselama ini, pada tahun 2007 pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang berguna untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di daerah perdesaan. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan terdapat 2 jenis program yang akan dijalankan dan didanai dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat, salah satunya adalah dana Bantuan Langsung Masyarakat pada program simpan pinjam perempuan (BLM SPP).

Dana Bantuan Langsung Masyarakat dalam Program Simpan Pinjam Perempuan bertujuan untuk mengembangkan potensi simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses usaha skala mikro, mendorong pengurangan rumah tangga miskin, memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikutserta dalam meningkatkan pendapatan rumah tangganya, peningkatan lapangan kerja serta

---

<sup>1</sup>Isnila Diyarsi. 2007. Perilaku Rumah Tangga Miskin Dalam Memanfaatkan Bantuan Langsung Tunai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak (BLT PKPS-BBM). Padang : *Skripsi* Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas. Hal 5-6

mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha bagi rumah tangga miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Program dana Bantuan Langsung Masyarakat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan ini sudah diimplementasikan hampir diseluruh wilayah di Indonesia tidak terkecualipun di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat sendiri angka kemiskinan yang tinggi telah menyadarkan berbagai pihak, termasuk perantau yang tidak menyangka banyaknya masyarakat Sumatera Barat yang dikenal dengan etnik Minang, berada dalam kemiskinan (Indraddin, 2012:2).

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2012 sebanyak 397.855 jiwa dari 4,9 juta jiwa penduduk Sumatera Barat. Dari jumlah itu sebanyak 124.252 jiwa terdapat di perkotaan dan 273.603 di pedesaan. Penduduk miskin di wilayah pedesaan itu tersebar diberbagai nagari yang ada di Sumatera Barat, khususuntuk Nagari Kamang Mudiak, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat sekitar 690 Rumah Tangga Miskin yang terdapat di Nagari Kamang Mudiak dan tersebar di delapan jorong. Komposisi keluarga miskin di setiap jorong dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Rumah Tangga Miskin di Nagari Kamang Mudiak**

No.	Jorong	Jumlah KK	Jumlah Kepala Keluarga Miskin (KK Miskin)	Persentase(%)
1.	Durian	458	80	17.46
2.	Aia Tabik	231	57	24.67
3.	Bansa	162	34	20.98
4.	Babukik	277	64	23.10
5.	Halalang	237	64	27.00
6.	Padang Kunyik	191	56	29.31
7.	Pk. Sinayan	630	115	18.25
8.	Pauh	744	213	28.62
Total		2930	690	

**Sumber: *Walinagari Kamang Mudiak 2012***

Perbedaan jumlah rumah tangga miskin pada setiap jorong dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat setempat. Pada umumnya usaha yang dilakukan oleh keluarga miskin di Nagari Kamang Mudiak bersifat usaha mikro. Kegiatan usaha mikro tersebut dapat berkontribusi terhadap pendapatan dan perekonomian orang miskin. Namun orang miskin mengalami berbagai persoalan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha mikronya. Salah satunya adalah sulitnya untuk memperoleh modal usaha. Untuk itu pemerintah melalui program Bantuan Langsung Masyarakat kelompok simpan pinjam perempuan memberikan kesempatan kepada kaum perempuan dari rumah tangga miskin yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkannya, mereka diberikan kemudahan untuk mendapatkan modal usaha dalam program ini.

Kaum perempuan didalam sebuah keluarga seringkali dipercaya untuk mengelola keuangan seperti pengeluaran keluarga, dalam program ini perempuan

diberikan kesempatan untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka, dengan *skill* yang mereka punya sebagai pengelola keuangan rumah tangga, perempuan dipercaya bisa meningkatkan pendapatan keluarga melalui keterlibatan mereka dalam mengelola usaha yang dimiliki. Sehingga nanti diharapkan dengan program ini, kaum perempuan dapat membantu pendapatan keluarga hingga akhirnya diharapkan rumah tangga miskin tersebut dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka kedepannya.

Untuk mendapatkan dana BLM SPP ini, perempuan dari rumah tangga miskin (RTM) dan pengurus harus terlebih dahulu menyerahkan permohonan pinjaman kelompok yang telah ditandatangani oleh pihak pengurus dan perempuan dari rumah tangga miskin sebagai calon peminjam. Didalam permohonan pinjaman, ditulis usaha yang dimiliki dan yang akan dikembangkan oleh anggota peminjam. Jika ada anggota yang tidak memiliki usaha maka dia tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pinjaman dana tersebut.

Saat observasi awal dilakukan peneliti menemukan rumah tangga miskin yang terdaftar sebagai anggota kelompok SPP tidak mempergunakan dana sebagai modal untuk mengembangkan usaha mereka (produktif). Mereka menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan rumah tangga (konsumtif) seperti membeli karpet, gorden, kursi, kasur dan perlengkapan rumah tangga lain dan anehnya rumah tangga miskin yang menyalahgunakan dana tersebut tidak ada yang menunggak dalam proses pengembalian dana atau cicilan mereka tiap bulannya. Padahal jika RTM tidak mempergunakan dana untuk modal usaha,

seharusnya mereka mengalami kemacetan dalam pengembalian cicilan dan yang terjadi malah sebaliknya.

Dari fakta-fakta yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena ini. Untuk itu penelitian ini mencoba mendeskripsikan persoalan-persoalan yang terkait dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat kelompok simpan pinjam perempuan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, apa yang penyebab rumah tangga miskin melakukan penyalahgunaan dana dan bagaimana bentuk penerapan mekanisme kontrol dalam program.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM)dalam Program Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan sudah banyak diimplementasikan kepada masyarakat pedesaan hampir diseluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat. Salah satunya di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak, Jorong Babukik merupakan salah satu jorong yang berada di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Di Jorong ini sekurangnya ada 4 kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang peneliti temukan saat melakukan penelitian. Masing-masing kelompok beranggotakan paling kurang 20 orang.

Dana bantuan langsung masyarakat dalam program simpan pinjam perempuan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan akses modal usaha kepada kaum perempuan dari rumah tangga miskin yang membutuhkan modal usaha agar ikut serta dalam meningkatkan pendapatan keluarganya dengan

cara mengembangkan usaha yang dimilikinya, selain itu dana ini juga bertujuan untuk mendorong pengurangan jumlah rumah tangga miskin di perdesaan, meningkatkan lapangan pekerjaan, hal ini dapat dipertegas dengan salah satu ketentuan dasar dalam kegiatan SPP ini yaitu, pengembangan. Pengembangan adalah setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga nanti dapat meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat, serta mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha bagi rumah tangga miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian mereka.

Menurut data yang diperoleh dari bendaharaprogram kelompok SPP di jorong Babukik ada 33 perempuan dari RTM yang menjadi anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan Mawar I di Jorong tersebut<sup>2</sup> dan menurut bendahara programada 20 orang perempuan anggota SPP atau 60% tidak mempergunakan dana bantuan langsung masyarakat menurut yang semestinya yaitu sebagai modal usaha. Mereka malah mempergunakan dana untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan untuk dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan yang mendesak, misalnya membayar uang sekolah anak, sebagai tambahan untuk acara Khatam Al-qur'an, membeli kasur dan lain sebagainya dan anehnya cicilan dana yang harus dibayar rumah tangga miskin yang menyalahgunakan danabantuan langsung masyarakat kelompok simpan pinjam tersebut lancar dan tidak mengalami kemacetan.

---

<sup>2</sup>Nama Anggota Terlampir pada Lampiran 1

Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut, dikarenakan jika dana yang digunakan oleh anggota kelompok SPP tidak untuk modal usaha seharusnya mereka mengalami kendala saat mengembalikan cicilan dan yang terjadi malah sebaliknya. Untuk itu berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka pertanyaan penelitian ini adalah;

1. Apa penyebab rumah tangga miskin menyalahgunakan dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) kelompok SPP Mawar di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak.
2. Bagaimana bentuk penerapan mekanisme kontrol dalam pelaksanaan program tersebut.

### **1.3 Tujuan Penulisan Skripsi**

Tujuan penelitian ini adalah;

Tujuan Umum

Mendeskripsikan penyebab rumah tangga miskin melakukan penyalahgunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan dan mendeskripsikan bentuk penerapan mekanisme kontrol dalam pelaksanaan program tersebut.

Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi penyebab rumah tangga miskin melakukan penyalahgunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak.
2. Mendeskripsikan bentuk mekanisme kontrol yang diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut.

#### **1.4 Manfaat Penulisan Skripsi**

Manfaat dari penelitian ini diantaranya :

Bagi aspek Akademik.

- Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi masalah pengentasan kemiskinan.

Bagi aspek Praktis

- Bahan informasi dan pedoman bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai hal yang berhubungan dengan masalah pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sehingga pencapaian tujuan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran dan kebijakan tersebut bisa mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah bagi yang lainnya.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Landasan Teori**

Menurut teori strukturasi, bidang mendasar studi ilmu sosial bukanlah pengalaman aktor individual atau bentuk-bentuk kesatuan sosial tertentu, melainkan praktik sosial yang diatur melintas ruang dan waktu (Ritzer, 2007:507). Teori strukturasi mengawinkan dua pendekatan yang berseberangan dengan melihat hubungan dualitas antara agen dan struktur dan sentralitas ruang dan waktu.

Hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur berupa relasi dualitas (hubungan timbal balik). Dualitas tersebut terjadi dalam “praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu”. Dualitas terletak dalam fakta bahwa suatu “struktur mirip pedoman” yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu tersebut merupakan hasil perulangan berbagai tindakan kita. Namun sebaliknya, skemata yang mirip “aturan” itu juga menjadi sarana (*medium*) bagi berlangsungnya praktik sosial kita (Priyono, 2002:22).

Pada penelitian ini, Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak dapat ditelaah dengan menggunakan teori strukturasi yang dikemukakan oleh Giddens. Adanya Agen dalam teori strukturasi merupakan orang-orang yang berada di Nagari dan Jorong, baik itu anggotarumah tangga miskin, pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, tokoh masyarakat yang ada di nagari hingga ke jorong.

Manusia dipahami sebagai suatu makhluk yang memiliki kebebasan berfikir, bertindak dan merefleksikan diri dengan *knowledgeabilitasnya* sendiri

berdasarkan pemahaman akan historisnya. Manusia/agen termasuk anggota RTM atau pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat kelompok Simpan Pinjam Perempuan, mereka memiliki kemampuan mengambil jarak dan berfikir tentang diri, situasi dan posisinya dalam ruang dan waktu yang menjadi dasar reflektifitas terhadap kehidupan yang dilibatinnya.

Proses sosial akan terjadi secara berkesinambungan dimana struktur akan menginternalisasikan nilai-nilai pada agen. Agen juga akan melakukan tindakan sosial sehingga terciptalah aturan-aturan yang disepakati secara bersama di komunitas. Aturan tersebut akan menjadi sebuah struktur yang akan menentukan masyarakat menggunakan dana untuk modal usaha mereka atau tidak menggunakannya untuk modal usaha. Mana aturan yang akan dijalankan tergantung pada perulangan praktik sosial agen dalam merefleksikan diri dengan *knowledgeabilitasnya* sendiri berdasarkan pemahaman akan historisnya dan dalam penelitian ini masyarakat di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak tidak mempergunakan dana untuk modal usaha mereka. Melainkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif.

### **1.5.2 Konsep Kemiskinan**

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), miskin adalah tidak berharta benda atau serba kurang. Sedangkan menurut Friedman (1979) kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial meliputi: modal yang produktif atau aset, sumber-sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai); organisasi sosial dan politik

yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan pengetahuan atau keterampilan yang memadai, serta informasi yang berguna untuk memajukan kehidupannya.

Terdapat berbagai indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia diantaranya, indikator dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada empat belas kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama-sama dengan orang lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai dan air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya yang penghasilannya dibawah Rp 600 ribu per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,-. Seperti sepeda Motor (kredit/non kredit), Emas, Ternak, Kapal Motor atau barang lainnya.

Selanjutnya adalah indikator yang dikemukakan oleh Sayogyo, tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disertakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dibagi atas wilayah perdesaan dan perkotaan. Bagi daerah perdesaan ditetapkan atas :(a) miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (b) miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (c) paling miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun. Bagi daerah perkotaan ditetapkan atas : (a) miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun; (b) miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per

tahun; (c) paling miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun<sup>3</sup>.

Kemudian Bank Dunia mengukur garis kemiskinan dari besarnya pendapatan seseorang yang kurang dari satu dolar per hari (dalam Indraddin,2012:61-62).Lain lagi dengan indikator kemiskinan oleh BKKBN, BKKBN tidak menggunakan konsep kaya miskin untuk melapis penduduk secara ekonomi maupun sosial, melainkan konsep sejahtera.

Keluarga berdasarkan kesejahteraannya itu dibagi lima, yakni:

1. Keluarga Pra Sejahtera, dicirikan oleh ketidak mampuan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan spiritual, pakaian, makanan, perumahan dan kesehatan.
2. Keluarga sejahtera I, dicirikan oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan dan perumahan secara minimal, tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis.
3. Keluarga sejahtera II, dicirikan oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial-psikologis, tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pengembangan, seperti menabung dan memperoleh informasi.

---

<sup>3</sup> <http://restu-ayuningrum.blogspot.com>

4. Keluarga sejahtera III, dicirikan oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sosial dan psikologis serta kebutuhan pengembangan keluarga, tetapi belum memberikan kontribusi terhadap masyarakat.
5. Keluarga Sejahtera III Plus, dicirikan oleh kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep kemiskinan dari Friedman dan mengambil indikator rumah tangga miskin dari BPS. Konsep kemiskinan yang dikemukakan oleh Friedman merupakan konsep yang paling tepat untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Sebab Friedman menfokuskan kajian kemiskinan terhadap ketidaksamaan akumulasi modal seperti modal produktif, pengetahuan, informasi,dll. Sedangkan untuk indikator kemiskinan BPS yang dipakai dalam penelitian ini merupakan indikator yang juga digunakan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak dalam menentukan kriteria penduduk yang tergolong dalam Rumah Tangga Miskin.

### **1.5.3 Program Pengentasan Kemiskinan**

Program pengentasan kemiskinan telah banyak dilaksanakan di Sumatera Barat, beberapa program kemiskinan yang pernah dijalankan di Sumatera Barat yaitu;

#### **1.5.3.1 Jaringan Pengamanan Sosial (JPS)**

Melonjaknya angka kemiskinan akibat dari krisis ekonomi dan moneter pada media 1997, telah memaksa pemerintah menyiapkan berbagai langkah darurat guna mengatasi kian meluasnya dampak krisis tersebut. Sandang, papan, dan pangan menjadi prioritas utama. Program pengentasan kemiskinan ini, intinya mengarahkan segenap daya dan biaya untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. selain program darurat tersebut, pemerintah juga menggulirkan program Jaringan Pengamanan Sosial/ JPS (*Social Safety Net*), hasil pinjaman dari (*World Bank*), dimana tujuannya adalah untuk mendongkrak keterpurukan masyarakat miskin akibat imbas krisis moneter saat itu. Pada dasarnya JPS merupakan program pertolongan atau penyelamatan terhadap masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi, sehingga mereka mampu menjangkau kebutuhan dasar, kesehatan dan pendidikan.

Namun, program jaringan pengamanan sosial ini sering juga diselewengkan karena terdapat sejumlah kelemahan dalam prakteknya, misalnya penyimpangan-penyimpangan dan bantuan yang diberikan sering salah alamat, seperti dikutip dalam *Kompas* (1999), masalah tersebut timbul disebabkan tidak adanya kontrol dari pelaksana di lapangan, dimana mereka tidak menjalankan perannya dengan baik.

#### 1.5.3.2 Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pada saat pemerintahan menggulirkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka yang pertama cukup direpotkan adalah institusi Badan Pusat Statistik (BPS), baik ditingkat pusat, propinsi, hingga kabupaten /

kota. BLT yang diberikan kepada keluarga miskin tersebut dimaksudkan guna mengantisipasi implikasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 Oktober 2005, sebagai bagian dari program kompensasi pencabutan subsidi (PKPS) BBM. Kebijakan itu dilakukan sebagai dampak dari kenaikan harga minyak dunia di atas US\$ 60 per barel, sehingga memaksa pemerintah untuk menaikkan harga jual BBM di dalam negeri.

Dari sisi lain Biro Pusat Statistik (BPS) turut dibuat sibuk karena harus menyelesaikan pendataan keluarga miskin sebagai penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di semua propinsi sesuai target agar PT. Pos Indonesia bisa segera melakukan pencetakan kartu penerima BLT dan memulai penyaluran dana tersebut. Namun sayangnya petugas BPS justru kesulitan memilah kriteria warga miskin saat pendataan dilakukan, sehingga kerap kali menimbulkan keributan saat penyaluran BLT di lapangan. Program Kompensasi Pencabutan Subsidi (PKPS) BBM periode 2005-2006 tahap pertama diberikan melalui sektor pendidikan, kesehatan dan perbaikan infrastruktur pedesaan. Sedangkan tahap kedua, diberikan dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tanpa syarat pada keluarga miskin. Pemerintahan akan memberikan bantuan tunai senilai Rp 1,2 juta per keluarga miskin per tahun, yang diberikan dalam empat tahap

dengan perincian Rp. 300 ribu per keluarga setiap kali pembayaran (tiga bulan)<sup>4</sup>.

#### 1.5.3.3 Program Pembangunan Infrastruktur

Selanjutnya program anti kemiskinan yang bergerak dalam bidang pembangunan infrastruktur. Dibandingkan program lain program pembangunan infrastruktur ini pada dasarnya sangat bermanfaat bagi rumah tangga miskin dan cenderung bertahan lama. Program Pembangunan infrastruktur dapat memecahkan keterisolasian penduduk nagari dari kesulitan untuk mendapatkan pelayanan umum seperti pasar dan rumah sakit dan lain sebagainya. Misalnya pembangunan jalan dan jembatan atau sarana dan prasarana umum, dengan demikian program ini sangat membantu penduduk setempat untuk menjangkau tempat pelayanan umum dan memasarkan produksinya.

#### **1.5.4 Program Bantuan Langsung Masyarakat Kelompok SPP PNPM Mandiri Pedesaan**

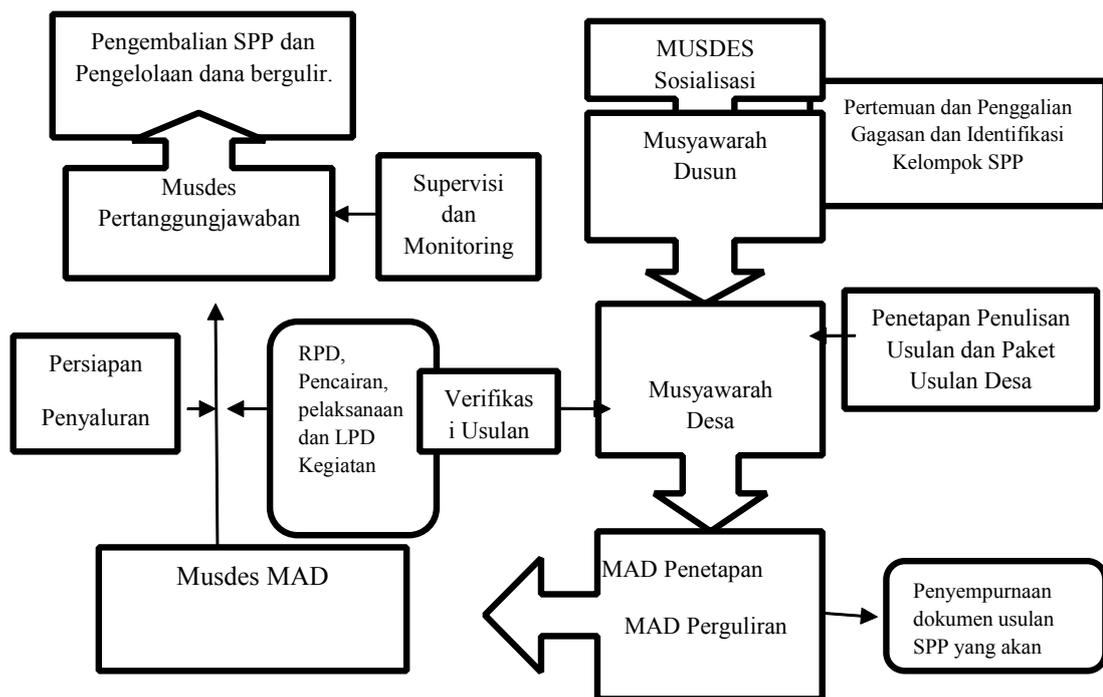
Program Bantuan Langsung Masyarakat Kelompok SPP merupakan salah satu program dari PNPM Mandiri Pedesaan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro demi mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan sebagai bentuk penciptaan lapangan kerja. Hal ini dapat dipertegas dengan salah satu ketentuan dasar dalam kegiatan simpan pinjam ini

---

<sup>4</sup>Musliar Kasim.2006.*Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Startegi Penanggulangannya*. Jakarta ,PT Indomedia Global. Hal 308-326

yaitu, pengembangan. Pengembangan adalah setiap keputusan dimana pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat<sup>5</sup>.

Agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam program bisa tercapai dan akhirnya program benar-benar bisa mengurangi jumlah rumah tangga miskin, dan juga meningkatkan perekonomian RTM. Pencetus program telah membuat alur kegiatan untuk menjaga keberlangsungan program. Alur tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Alur Kegiatan Program Simpan Pinjam**

**Sumber : Buku Panduan PNPM Mandiri Perdesaan, 2008**

***Keterangan Istilah:***

- Musdes Sosialisasi: Musyawarah Desa
- Musdes MAD: Musyawarah desa

<sup>5</sup>Buku Panduan PNPM Mandiri Perdesaan.2008.Hal 10.

- |   |  |
|---|--|
| <p>Sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok SPP: Kelompok Simpan Pinjam Perempuan</li> <li>- MAD Penetapan: Mekanisme Anggaran Dasar Penetapan</li> <li>- MAD Perguliran: Mekanisme Anggaran Dasar Perguliran</li> </ul> | <p>Mekanisme Anggaran Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RPD: Rencana Penggunaan Dana</li> <li>- LPD: Laporan Penggunaan Dana</li> </ul> |
|---|--|

Untuk mendapatkan dana bantuan langsung masyarakat program simpan pinjam ini rumah tangga miskin dan pengurus harus terlebih dahulu menyerahkan permohonan pinjaman kelompok yang telah ditandatangani oleh pihak pengurus dan rumah tangga miskin sebagai calon anggota peminjam. Didalam permohonan pinjaman ditulis usaha yang dimiliki dan yang akan dikembangkan oleh rumah tangga miskin. Jika rumah tangga miskin yang mau mendapatkan dana ini tidak memiliki usaha maka dia tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pinjaman dana tersebut.

Dalam pencairan dana pinjaman ini kelompok akan memeriksa kelayakan kredit yang diajukan oleh calon peminjam. Kemudian pengurus menjelaskan kembali ketentuan-ketentuan pinjaman kepada kelompok, antara lain mengenai lama pinjaman, besar jasa pinjaman, cara pengembalian dan ketentuan-ketentuan lainnya. Jika menurut UPK pengajuan pinjaman kelompok dinyatakan layak dan kelompok menerima ketentuan-ketentuan yang ada, maka dana pinjaman dapat dicairkan dengan disertai surat perjanjian pemberian pinjaman (akad kredit) yang harus ditandatangani oleh pengurus dan peminjam seterusnya pengurus kelompok memberi penjelasan tentang jumlah pinjaman yang diterima dari UPK kemudian kelompok menyerahkan pinjaman kepada anggota dengan disaksikan oleh anggota yang lainnya serta juga dihadiri oleh petugas UPK / pendamping

kelompok dan pengurus mencatat nama-nama anggota yang telah menerima pinjaman dan menjelaskan besar angsuran yang harus dibayar tiap periode angsuran.

Dalam pengembalian pinjaman pengurus kelompok / bendahara menerima dan mencatat angsuran dari anggota kelompok kemudian pengurus kelompok menyetor angsuran kepada bendahara UPK sesuai dengan perjanjian dan pengurus kelompok juga menerima tanda bukti angsuran dari bendahara UPK<sup>6</sup>.

### **1.5.5 Strategi Pengentasan Kemiskinan**

Teori Midgley tentang pembangunan kesejahteraan sosial dapat dipakai untuk menjelaskan bentuk strategi yang akan digunakan untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Katanya ada tiga pendekatan yang dapat dipakai dalam strategi pengentasan kemiskinan yaitu: pendekatan individu, pendekatan masyarakat dan pendekatan pembangunan kapasitas pemerintah<sup>7</sup>.

Pertama pendekatan individu. Pendekatan individu memandang bahwa individu bisa mendapatkan kesejahteraannya jika ia meningkatkan minat kerjanya. Dalam pendekatan ini fungsi individu menjadi peran penting dalam menentukan kesejahteraan mereka sendiri. Penganut pendekatan ini berpendapat bahwa untuk dapat mengangkat kesejahteraannya sendiri, mereka harus mampu berfungsi secara efektif dan bekerja dengan percaya diri dalam konteks budaya (*enterprise*

---

<sup>6</sup>Buku Panduan Penulisan Proposal Kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan, 2008.

<sup>7</sup>James Midgley. 2005. *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta, Ditperta Islam Depag RI. Hal 150-182

usaha) dan mempunyai motivasi yang kuat dalam dirinya agar dapat keluar dari keadaan miskin yang membelenggunya.

Kedua Pendekatan Masyarakat. Pandangan ini melihat bahwa pembangunan sosial dan kemiskinan dapat di angkat oleh rakyat sendiri, dengan membentuk kerjasama secara harmonis. Pendukung strategi ini percaya bahwa masyarakat memiliki kapasitas yang inheren untuk mengorganisir diri mereka sendiri untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka dapat terpenuhi, masalah yang mereka hadapi dapat dipecahkan sehingga tercipta kesempatan untuk memperbaiki hidup.

Ketiga adalah pendekatan pemerintah, pendekatan ini melihat kesejahteraan sosial dapat diangkat dengan terlibatnya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan wewenang yang ada ditangan pemerintah ia dapat mengontrol sumber daya alam, menunjukkan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada dan bagaimana menjaga agar generasi yang akan datangpun memiliki akses sumber ini nantinya. Dengan begitu melalui pendekatan pemerintah ini dengan semua program dan kebijakan yang ada di alokasikan, diharapkan dapat mengeluarkan masyarakat miskin dari jurang kemiskinan.

Kesejahteraan dalam pengentasan kemiskinan ini dapat dicapai apabila tiga pendekatan tentang asumsi pemerintah untuk membantu masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan, masyarakat juga melakukan tindakan untuk membantu masyarakat miskin dan terakhir individu sendiri yang membantu dirinya dan berusaha untuk keluar dari jurang kemiskinan maka kesejahteraan tersebut akan tercapai.

### **1.5.6 Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terkait dengan program pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut. Pertama adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Isnila Diyarsi (2007) mengenai Perilaku Rumah Tangga Miskin dalam Memanfaatkan Bantuan Langsung Tunai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak (BLT-PKPS BBM) (Kasus Di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang). Dalam hasil penelitiannya Isnila menyebutkan rata-rata semua informan memanfaatkan BLT PKPS-BBM yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti untuk makan, membeli baju, merehab rumah, biaya pendidikan anak, membeli ternak, biaya berobat, membeli pupuk, benih, modal usaha dan untuk membayar hutang serta disimpan atau ditabung.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Muharma Putra (2011) tentang “Marginalisasi Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Di Sumatera Barat (*Studi pada Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam*)”. Didalam hasil penelitiannya Ikhsan menyebutkan bahwa adanya RTM yang termarginalkan, pergerakan masyarakat terutama RTM hanya bersifat artifisial yaitu partisipasi RTM hanya semata-mata untuk kesuksesan program atau kegiatan. Sehingga dapatlah kita lihat adanya RTM yang masih termarginalkan. Indikasi termarginalnya RTM terlihat pada;

1. Tidak pernah dilakukan pengkajian partisipatif secara maksimal
2. RTM tidak benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

3. RTM dilibatkan sebagai pekerja untuk mendapat upah harian.
4. RTM tidak dipercaya untuk mendapat pinjaman SPP, karena takut tidak akan mampu membayar hutang.
5. Proses Musyawarah yang berperan adalah *elite* dan aktivis yang juga memiliki kepentingan.
6. Proses musyawarah dilakukan sekedar formalitas

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Sisca Yulia Jafrita (2012) tentang “Alasan dan Kendala Pengembalian Pinjaman Bergulir Pada Tingkat KSM Dalam PNPM Mandiri Perkotaan” (Studi Dikelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang Kota Bukittinggi). Dalam penelitiannya Sisca memfokuskan penelitiannya tentang Alasan Dan Kendala Pengembalian Pinjaman Bergulir Pada Tingkat KSM dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sisca ini diketahui bahwa alasan KSM melakukan pinjaman bergulir adalah untuk mendapatkan modal usaha, pinjaman bergulir tidak memakai bunga, pinjaman bergulir merupakan pinjaman dari pemerintah. Juga dapat diketahui bahwa kendala pengembalian pinjaman bergulir ini yaitu karena banyaknya usaha KSM yang macet, pengembalian pinjaman tidak tepat waktu dan yang terakhir karena anggota KSM memanfaatkan pinjaman tersebut untuk kebutuhan hidup dan tidak dijadikan sebagai modal usaha.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Wenny Widya Wahyudi, Efektivitas Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Miftahul Jannah dalam Program PNPM-MP di Jorong Pasa Tiku Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan SPP

Miftahul Jannah di Jorong Pasa Tiku kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam telah melalui tahap sosialisasi, seleksi, penyaluran dan pencairan dana, serta pengembalian dana dan semua kegiatan berjalan dengan lancar. Kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan Miftahul Jannah dinilai Efektif, dalam keberlanjutan usaha, aturan kelompok dan kegunaan dana, serta peningkatan pendapatan. Penelitian ini menyarankan agar anggota dan pengurus kelompok mengembangkan kegiatan usaha dan manajemen serta mendapat pembinaan yang berkelanjutan. Dalam memimpin dan kelompok harus memiliki manajemen yang baik. Kelompok supaya lebih dapat meningkatkan kegiatan kelompok, dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi anggota kelompok melalui kerja sama dengan pihak terkait. Pemerintah pelaku PNPM-MP di daerah terkait diharapkan dapat memberikan suatu binaan yang berlanjut terus-menerus<sup>8</sup>.

Jadi yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas adalah dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan program pengentasan kemiskinan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Hal ini terkait dengan adanya indikasi bahwa perempuan yang terdaftar dalam kelompok SPP Mawar dalam program ini melakukan penyalahgunaan terhadap dana yang diberikan, dana yang seharusnya dipergunakan sebagai modal usaha malah dipergunakan untuk sesuatu yang bersifat konsumtif padahal semua perempuan

---

<sup>8</sup><http://repository.unand.ac.id>. Diakses November 2013.

dari rumah tangga miskin anggota kelompok SPP Mawar tersebut memiliki usaha yang akan dikembangkan.

Selain itu penulis juga menemukan kenyataan ternyata perempuan anggota SPP yang menyalahgunakan dana BLM, tidak menunggak cicilan mereka tiap bulannya. Padahal seharusnya jika penyalahgunaan terjadi maka perempuan tersebut mengalami kemacetan dalam pengembalian cicilan. Untuk itu penuliser tertarik untuk dapat mengetahui penyebab perempuan anggota SPP melakukan penyalahgunaan dana BLM dan bagaimana bentuk penerapan mekanisme kontrol yang dijalankan dalam program ini.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Penelitian kualitatif peneliti anggap sebagai metode penelitian yang paling tepat untuk memahami definisi situasi serta gejala sosial yang peneliti amati. Dalam penelitian ini fenomena yang diamati antara lain yaitu penyebab perempuan anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan tidak menggunakan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) sesuai dengan tujuan dana itu diberikan yaitu untuk

modal usaha dan bagaimana bentuk penerapan mekanisme kontrol yang dijalankan dalam program.

Pendekatan deskriptif adalah tipe pendekatan yang bermaksud membuat penginderaan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian<sup>9</sup>. Pendekatan deskriptif berupaya mengalihkan suatu kesan terhadap sesuatu melalui panca indera dan menuangkannya dalam bentuk tulisan mulai dari kondisi awal penelitian sampai proses akhir penulisan. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan penyebab perempuan anggota simpan pinjam perempuan menyalahgunakan dana BLM di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak dan bagaimana bentuk penerapan mekanisme kontrol dalam program tersebut.

### **1.6.2 Informan Penelitian**

Dalam penelitian ilmu sosial, informan merupakan salah satu sumber untuk mendapatkan data yang diperlukan (terutama dalam penelitian kualitatif). Informan dalam penelitian ini adalah subyek karena dipandang sama dengan penulis jadi tidak sebagai objek atau lebih rendah kedudukannya akan tetapi sebagai manusia yang setaraf (Nasution, 1998:10).<sup>10</sup>

Menurut Spradley informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan sesuai dengan tujuan penelitian. *Purposive* adalah peneliti

---

<sup>9</sup>Sumadi Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : UGM. Hal 19

<sup>10</sup>Nasution, S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung, Tarsitu. Hal 10

telah menentukan responden atau informan dengan anggapan atau pendapatnya sendiri sebagai sampel penelitiannya<sup>11</sup>.

Dalam penelitian ini jumlah informan yang peneliti ambil adalah 9 orang. 5 orang informan adalah perempuan dari rumah tangga miskin yang terdaftar sebagai anggota kelompok simpan pinjam perempuan, sedangkan 4 orang adalah informan dari pihak pengelola program. Informan tersebut merupakan informan yang termasuk dalam gambaran kriteria informan yang telah ditetapkan, gambaran kriteria terhadap pemilihan informan yaitu:

1. Informan adalah Perempuan dari Rumah Tangga Miskin (RTM) yang terdaftar sebagai anggota dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan, yang menyalahgunakan dana Bantuan Langsung Masyarakat.
2. Informan adalah pengelolaprogram BLM kelompok SPP PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat Jorong, seperti ketua, bendahara dan sekretaris.
3. Informan adalah pengelola program BLM kelompok SPP di tingkat Nagari, Seperti Wali Nagari, Sekretaris Nagari atau staf Pemerintahan Nagari.

### **1.6.3 Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan selama melakukan penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian di lapangan. Sedangkan data

---

<sup>11</sup>Manase Mallo.1986.*Metode Penelitian Sosial*.Yogyakarta,UT. Hal 168.

sekunder adalah data yang memperkuat data primer, dimana sumber data dikumpulkan melalui lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

Untuk lebih jelasnya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan selama penelitian dapat dilihat dalam tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Sumber dan Cara Pengambilan Data**

Data	Data yang Dikumpulkan	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
<p><b>Data Primer</b></p> <p>1. Mengetahui penyebab rumah tangga miskin melakukan penyalahgunaan dana BLM PNPM MP</p> <p>2. Mekanisme kontrol dalam pelaksanaan program.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan rumah tangga miskin melakukan penyalahgunaan dana BLM.</li> <li>• Bentuk-bentuk penyalahgunaan yang dilakukan</li> <li>• Proses pencairan dana.</li> <li>• Cara-cara yang dilakukan dalam mengontrol pelaksanaan program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> <li>• Wawancara</li> <li>• Observasi dan Wawancara</li> <li>• Observasi dan Wawancara</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Tangga Miskin.</li> <li>2. Rumah Tangga Miskin</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelola program dana BLM SPP.</li> <li>2. Pengelola program dana BLM SPP.</li> </ol>
<p><b>Data Sekunder</b></p> <p>Monografi Lokasi Penelitian</p>	Keadaan geografis, keadaan demografis, mata pencaharian, pendidikan.	Studi Dokumentasi	Laporan monografi Nagari Kamang Mudiak Kab. Agam

#### **1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia dengan cara interpretasi. Data tersebut terdiri dari pembicaraan-pembicaraan orang atau data lisan, tulisan-tulisan (tulisan di media, surat menyurat, kebijakan pemerintah, notulen rapat, dan lain-lain, aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh orang, isyarat-isyarat yang disampaikan oleh orang dan ekspresi fisik seperti raut muka ketika gembira dan marah. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan data utama yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio dan pengambilan foto atau film (Moleong, 2002:112).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

##### 1.6.4.1 Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti<sup>12</sup>. Teknik observasi merupakan suatu studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pencatatan dan pengamatan dengan menggunakan panca indera. Selain panca indera alat yang peneliti gunakan untuk mengungkapkan hasil observasi adalah kamera film yang peneliti hasilkan

---

<sup>12</sup>Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal 52.

sendiri, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi yang diamati (Waridah, 2001:89).

Penelitian ini menggunakan teknik observasi yang bersifat *non participant*, dimana peneliti hanya mengamati hal-hal yang sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti tanpa menyembunyikan identitas peneliti. Dalam melakukan observasi peneliti telah mengamati bentuk-bentuk usaha yang diusahakan oleh RTM anggota SPP. Rata-rata RTM yang terdaftar sebagai anggota kelompok SPP memiliki usaha dibidang pertanian. Anggota tersebut sangat menggantungkan nasibnya kepada hasil sawah (padi) yang mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Selanjutnya penulis juga mengobservasi bentuk-bentuk tahapan penyaluran bantuan, pemantauan dan sosialisasi program yang dilakukan dalam mengontrol jalannya program. Setelah melakukan observasi ada beberapa tahapan-tahapan yang penulis temukan saat program dilaksanakan. Dalam proses pencairan dana, hasil observasi yang peneliti dapatkan adalah proses pencairan dana harus diawali dengan pembuatan proposal yang didalamnya tertulis usaha-usaha yang akan dikembangkan. Observasi ini peneliti lakukan disekretariat PNPM Mandiri Perdesaan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak.

#### 1.6.4.2 Wawancara Mendalam

Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur untuk mendapatkan data dari informan, teknik wawancara tidak berstruktur artinya

peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara terperinci dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan hanya mempunyai pertanyaan yang umum yang kemudian dirincikan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk wawancara berikutnya (Afrizal, 2005:16).

Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang penyalahgunaan dana BLM SPP. Penulis telah mencari informan sebagai sumber data. Beberapa anggota kelompok SPP yang menyalahgunakan dana BLM telah penulis wawancarai sebagai informan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan di rumah informan dan dilaksanakan saat para informan memiliki waktu luang. Dalam satu hari peneliti hanya mewawancarai satu informan saja, agar penulis lebih mudah mengingat dan merangkum hasil wawancara.

Pencarian informan ini dibantu oleh informan pangkal yang telah penulis kenal sebelumnya. Kemudian penulis mencari informan kunci yang dianggap mampu merepresentasikan tentang realita yang terjadi. Secara umum, peneliti sudah mewawancarai 5 (lima) orang informan perempuan dari RTM anggota kelompok SPP dan 4 (empat) orang pengelola program dana bantuan langsung masyarakat kelompok simpan pinjam perempuan.

Saat melakukan wawancara peneliti memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud melakukan wawancara dan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara penulis dengan

informan. Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan informan, wawancara dengan informan peneliti awali dengan menanyakan berapa jumlah pinjaman RTM tersebut, dan selanjutnya peneliti membiarkan informan untuk bercerita panjang lebar tentang program dan penulis juga mengarahkan pembicaraan informan tersebut kepada fokus penelitian dan penulis langsung mencatat informasi yang peneliti butuhkan saat wawancara dilakukan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan perempuan anggota kelompok SPP dana yang dipinjam oleh mereka berkisar antara 1 juta- 4 juta. Dana itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif dan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan perempuan anggota kelompok SPP, wawancara dengan pengelola program dan tokoh masyarakat juga diawali dengan memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud penulis melakukan wawancara. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan menanyakan hal-hal yang terkait dengan tahapan-tahapan proses penyaluran dana, sosialisasi, pemantauan dan hal lainnya yang penulis butuhkan untuk penelitian ini.

#### 1.6.4.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Serta berbagai dokumen penting lainnya yang sekiranya dibutuhkan dalam penelitian ini. Ada pula dokumentasi yang dibuat oleh peneliti sendiri, dokumentasi yang demikian

biasanya dibuat oleh peneliti sebagai hasil perekaman wawancara maupun observasi di lapangan. Dokumen yang dibuat oleh peneliti sendiri antara lain berupa *field notes* (catatan lapangan), foto-foto penelitian, video, maupun rekaman suara.

### **1.6.5 Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini berguna untuk memfokuskan penelitian yang dilakukan atau penentuan kriteria objek penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Untuk penelitian ini yang mengkaji penyalahgunaan dana BLM oleh perempuan anggota kelompok SPP dalam PNPM Mandiri Perdesaan ditetapkan unit analisisnya adalah individu dalam kelompok. Dalam hal ini individu dapat berasal dari pengelola dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dan individu yang berasal dari RTM.

### **1.6.5 Analisis Data**

Menurut Spradley dalam Afrizal analisis data adalah aktivitas yang terus menerus dalam melakukan penelitian. Analisis data merupakan pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, serta hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhannya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup>Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: dari pengertian sampai penulisan laporan*. Padang : Laboratorium Sosiologi FISIP UNAND. Hal 54.

Penelitian ini menggunakan analisis data interpretatif kualitatif artinya data yang telah terkumpul dianalisis menurut kemampuan dan interpretasi peneliti yang didasarkan pada teori yang telah dipelajari. Analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data-data yang diperoleh dari lapangan kedalam tema-tema, kategori-kategori.

Penulis melakukan pengecekan ulang *check and recheck* terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Keseluruhan data yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah secara sistematis, sehingga penulis akhirnya menemukan tema-tema yang saling berkaitan. Kemudian diuraikan dalam bagian-bagian sub judul pada bab sesuai dengan temanya masing-masing, sehingga dapat ditemukan sebuah konsep dan sebuah kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Data yang didapat dilapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan (*field Note*).

#### **1.6.6. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Babukik Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Jorong Babukik merupakan lokasi yang memiliki kelompok SPP paling banyak dari 8 jorong yang ada di nagari Kamang Mudiak, jorong Babukik juga merupakan lokasi yang mendapatkan penghargaan dari pengurus dana BLM SPP di pusat, penghargaan tersebut diberikan karena anggota kelompok SPP di Jorong ini tidak pernah menunggak dalam pembayaran cicilan mereka.

Sampai saat penelitian ini dilakukan ada 4 kelompok SPP yang ada di Jorong Babukik, masing-masing kelompok SPP tersebut memiliki anggota minimal 20 orang. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan pada kelompok SPP Mawar I, hal ini dikarenakan kelompok SPP Mawar merupakan kelompok SPP yang pertama kali di ada di Jorong Babukik. Selain itu kelompok SPP ini juga kelompok yang paling banyak memiliki anggota yaitu 33 orang dan paling banyak mendapatkan dana pinjaman yaitu sebesar Rp. 160.000.000,-.

Namun saat observasi awal dilakukan dilapangan peneliti menemukan ada anggota kelompok SPP yang tidak mempergunakan dana bantuan langsung masyarakat untuk kebutuhan permodalan usaha mereka, padahal dana bantuan langsung masyarakat dalam program simpan pinjam perempuan ini bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin dalam pemudahan akses kebutuhan pendanaan modal usaha.

#### **1.6.7. Defenisi Operasional Konsep**

1. Alasan adalah suatu dorongan atau hal dasar yang dimiliki individu sehingga mereka mau atau tidak mau melaksanakan suatu tindakan tertentu.
2. BLM PNPM MP (Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) adalah kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro demi mendorong pengurangan Rumah Tangga Miskin dan sebagai bentuk penciptaan lapangan kerja. Dimana pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga

nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

3. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak seperti kebutuhan makanan maupun non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.
4. Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan itu terjadi setelah seorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu yang sebagian besar pengetahuan tersebut diperoleh melalui mata dan telinga.
5. Perilaku adalah respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat berbentuk pasif (tanpa tindakan nyata, seperti berfikir, berpendapat, bersikap) maupun bersifat aktif dalam bentuk melakukan tindakan nyata. Dengan kata lain perilaku juga merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan sikap dan tindakan.
6. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang berada pada kondisi miskin, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan dan keterbatasan rumah tangga dalam berbagai hal yang menunjang kesejahteraan hidupnya. Kondisi ini oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dibagi kedalam 14 indikator yang telah ditetapkan.
7. Tindakan adalah reaksi atau respon seseorang terhadap stimulus yang dapat diobservasi secara langsung melalui panca indra.

### 1.6.8 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian dalam proses penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 1.3.

**Tabel 1.3 Jadwal Penelitian**

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal Penelitian														
		2012		2013												2014
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Survei Awal															
2	Pembuatan TOR															
3	Memasukan TOR ke Jurusan															
4	Rapat Jurusan															
5	Keluar SK Pembimbing															
6	Bimbingan dengan Dosen															
7	Seminar Proposal															
8	Perbaikan Hasil Seminar Proposal															
9	Mengurus Surat Izin Penelitian dan Melakukan Penelitian															
10	Penulisan Skripsi															
11	Rencana Ujian Kompre															
12	Perbaikan Skripsi															